



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PANDE PUTU OKA KUSUMAWARDANI
2. Jabatan : DIREKTUR STRATEGI PERPAJAKAN
3. NHK : 767174

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	14.705.574.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 44 m2/44 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.378.574.000		
4. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA BADUNG, Rp. 9.527.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	804.000.000
1. MOBIL, MAZDA CX5 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
2. MOBIL, BYD SEALION Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 629.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	145.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	6.140.369.966
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.947.250.661
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	24.742.194.627
III. HUTANG	Rp.	390.170.831
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	24.352.023.796



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.